

ABSTRAK

PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NATASHA ASMARA

Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021. Sehingga dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor PKB karena adanya kewenangan sesuai dengan undang-undang yang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pembatasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung tahun 2021? (2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

Penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data dengan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pelaksanaan pembatasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 dalam hal peningkatan Pajak Daerah yang nyatanya terbukti belum mampu mengoptimalkan target penerimaan PKB. (2) Faktor penghambat secara rasional pemberian keringanan denda PKB tidak dapat menimbulkan efek kesadaran, adanya pembatasan jam ketika PPKM, masyarakat tidak memanfaatkan aplikasi yang ada.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Pemerintah Provinsi Lampung perlu memaksimalkan sosialisasi pendaftaran pajak secara online agar masyarakat tidak perlu menunggu lama dan biaya sudah tertera sehingga masyarakat tergerak untuk membayar PKB. (2) Pemerintah Provinsi Lampung perlu meningkatkan kinerja dalam hal pembayaran online di Provinsi Lampung agar terciptanya kemudahan

bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pemberian, Keringanan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

GRANTING RELIEFS OR EXEMPTIONS AGAINST ARREARS AND PENALTIES OF VEHICLE TAXES FOR INCREASING LOCAL ORIGINAL INCOME OF LAMPUNG PROVINCE

By

NATASHA ASMARA

The Lampung Provincial Government enforces Lampung Governor Regulation No. 14 of 2021 concerning the Granting of Relief or Exemption on Principal Arrears and Fines for Motor Vehicle Taxes and Transfer Fees for Motorized Vehicles in Lampung Province in 2021. So that in order to increase PAD from the PKB sector because of the authority based on law that can provide reductions, relief, and liberation. The problems of this research are: (1) How is the Implementation of Restrictions on arrears and fines for Motor Vehicle Taxes in increasing the Lampung Province's Original Regional Revenue in 2021? (2) What are the inhibiting and supporting factors in granting relief or exemption from arrears and motor vehicle tax fines in increasing Regional Original Income?

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data processing by selection, classification, and compilation. Data were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate: (1) the implementation of restrictions on arrears and fines for Motor Vehicle Taxes in increasing Lampung Province Original Revenue in 2021. The Lampung Provincial Government has issued Lampung Governor Regulation Number 14 of 2021 in terms of increasing Regional Taxes which in fact have not been able to optimize the target. PKB acceptance. (2) The inhibiting factor is that rationally providing relief from PKB fines cannot cause awareness effects, there are restrictions on hours when PPKM, people do not take advantage of existing applications.

Suggestions in this study are: (1) The Lampung Provincial Government needs to maximize the socialization of online tax registration so that people do not have to wait long and the fees are listed so that people are moved to pay PKB. (2) The Lampung Provincial Government needs to improve performance in terms of online payments in Lampung Province in order to create convenience for the community.

Keywords: Grants, Relief, Local Revenue, Vehicle Tax.